

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menyajikan kondisi finansial suatu perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan diharapkan bersifat transparansi dan dapat mencerminkan kondisi dari perusahaan yang sebenarnya. Secara konseptual laporan keuangan adalah media yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan yang telah dilakukan dan dialami perusahaan selama satu periode tertentu (Sulistyanto,2018:18). Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pentingnya peranan laporan keuangan adalah sebagai pengukuran dan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta penilaian kinerja sebuah perusahaan. Oleh sebab itu laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Laporan keuangan tahunan perusahaan merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal.

Secara umum pasar modal merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Keberadaan pasar modal di

Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada masyarakat modern, menjadi investor dalam pasar modal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan pembelian saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal (Kasih, 2017). Pasar modal adalah wadah bagi emiten yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha serta pihak investor yang memerlukan tempat atau media untuk berinvestasi sehingga memperoleh keuntungan dari investasi tersebut di pasar modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir sejak jaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Perusahaan-perusahaan yang bergabung di BEI terbagi menjadi beberapa sektor industri, salah satunya adalah industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga dapat dikatakan industri manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di Indonesia.

Parameter dalam laporan keuangan yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi di pasar modal atau BEI adalah informasi tentang tingkat laba perusahaan. Laba merupakan daya tarik utama suatu perusahaan dan menjadi faktor penting yang membuat investor memutuskan untuk berinvestasi dalam perusahaan. Pada umumnya, manajemen memilih kebijakan tertentu agar dapat melaporkan laba yang baik dalam laporan keuangan (Barus,dkk., 2015). Informasi laba dapat menjadi media informasi potensial bagi investor dalam mengambil keputusan mengenai investasi yang akan dilakukan pada sebuah perusahaan. Menurut Dechow & Schrand (2004)

menyatakan bahwa saat laba mengikuti semangat dan aturan-aturan dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, laba akan berkualitas tinggi di mata para regulator. Informasi laba sering kali menjadi target manipulasi melalui perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya sendiri yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan yang memungkinkan terjadi praktik manajemen laba. Manajemen laba dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

Manajemen laba merupakan upaya manajerial untuk mengintervensi informasi dalam laporan keuangan dengan cara memanfaatkan kebebasan memilih dan menggunakan metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi (Sulistyanto,2018:17). Terdapat tiga pola laba yang bisa dipilih dan dipakai manajer untuk mengubah informasi pada laporan keuangan, seperti apabila manajer menginginkan kinerja terlihat lebih baik daripada kinerja sesungguhnya maka manajer akan menaikkan informasi labanya lebih tinggi dibandingkan laba sesungguhnya. Sementara apabila manajer menginginkan kinerja perusahaan terlihat lebih menurun maka manajer itu akan mengatur labanya lebih rendah dibandingkan kinerja sesungguhnya. Sedangkan agar kinerjanya terlihat lebih merata selama beberapa periode, manajer akan mengatur informasi sedemikian rupa sehingga labanya tidak bergerak secara fluktuatif selama periode-periode itu. Berdasarkan pemikiran tersebut manajemen laba dinilai sebagai cerminan perilaku oportunistik manajer dengan mempercantik laporan keuangan, yaitu melaporkan laba atau kinerja sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai.

Terdapat beberapa fenomena praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) salah satu contoh yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau TPS Food. Bursa Efek Indonesia memanggil direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada 29 Maret 2019 untuk meminta penjelasan terkait dengan keluarnya hasil investigasi laporan keuangan 2017 oleh PT Ernest & Young Indonesia (EY). Hasil investigasi berbasis fakta PT Ernest & Young Indonesia (EY) terhadap laporan keuangan 2017 PT AISA atau TPS Food mendapati adanya dugaan penggelembungan (*overstatement*) senilai Rp. 4 triliun oleh manajemen lama pada beberapa pos akuntansi. Hasil investigasi EY tersebut sudah dilaporkan manajemen baru PT AISA ke BEI pada 27 Maret 2019 (www.bareksa.com). Ditemukan fakta dugaan penggelembungan pada pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Temuan lain dari laporan EY tersebut adalah aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Selain itu, ditemukan adanya hubungan serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan (*disclosure*) yang memadai kepada *stakeholder* secara relevan (www.cnbcindonesia.com).

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan adalah dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang didasarkan pada teori keagenan,

diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa dana yang diinvestasikan akan digunakan dengan baik dan efisien sehingga akan menghasilkan *return* yang maksimal. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dinilai dapat memperbaiki citra perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri dalam rangka menciptakan sistem perusahaan yang sehat (Indrarini,2019:5).

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lain. Kepemilikan institusional berperan dalam mengurangi praktek manajemen laba karena investor institusional dianggap sebagai bagian yang berpengalaman dalam menganalisa laporan keuangan sehingga tidak mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manejer. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat (2018), Putri (2019), dan Juliani (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan hasil penelitian Perdana (2019), Rahayu

(2019), dan Kustina (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Dewan komisaris independen harus bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak secara independen untuk pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan komisaris independen maka akan semakin rendah tindakan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Sumariati (2017), Khuriyati (2018), dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pernyataan ini terdapat perbedaan dengan penelitian Prastuti (2019), Kirana (2019), dan Rahayu (2019) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan kepentingan antara pemegang saham dengan kepentingan pihak manajemen, karena pihak manajemen akan ikut merasakan manfaat dari keputusannya sehingga dapat menekan terjadinya manajemen laba. Menurut penelitian Fatimah (2019), Nuriawati (2019), dan Putri (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan penelitian Bellavito (2018), Rahmat (2018), dan Kirana (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan semakin baik sehingga dapat membantu mengurangi tingkat manajemen laba. Hasil penelitian Sumariati (2017), Khuriyati (2018), dan Dewi (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sementara Rahmat (2018), Perdana (2019), dan Lindra (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk meneliti kembali sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) serta pengaruhnya terhadap manajemen laba. Penelitian ini dimotivasi karena adanya perbedaan penelitian sebelumnya, maka judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dituliskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.

UNMAS DENPASAR

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi investor dalam menentukan kebijakan investasi dengan mempertimbangkan perusahaan dengan melihat struktur kepemilikannya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi organisasi, institusi, serta perusahaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingannya sendiri (Indrarini,2019:12). Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa agen sebagai yang diberikan wewenang oleh prinsipal, tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya. Pengertian prinsipal disini adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Salah satu hubungan keagenan utama adalah antara kelompok manajemen dan kelompok pemegang saham. Masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungannya sendiri karena adanya berbagai kepentingan. Sebagai agen, manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*) dan akan memperoleh balas jasa sesuai kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan. Pihak agen akan termotivasi untuk mengoptimalkan balas jasa yang diinginkan demi memenuhi kebutuhan psikologis dan ekonominya. Sedangkan prinsipal termotivasi untuk memaksimalkan *return* demi mensejahterakan dirinya (Kustina, 2019).

Terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yang disampaikan oleh Eisenhardt (1989) yaitu:

- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
- 3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)

Sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajemen sebagai manusia akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal tidak memiliki cukup informasi mengenai kinerja agen. Agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, perusahaan secara keseluruhan dan prospek dimasa yang akan datang. Ketidakseimbangan informasi membuat manajer (*agent*) cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) karena merasa memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan yang tidak dimiliki oleh prinsipal. Salah satu cara untuk mendisiplinkan pengelola agar mentaati kontrak yang telah disepakati yaitu dengan menerapkan suatu mekanisme pengawasan melalui tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan (Hamdani,2018:31). *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat dikatakan berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut pendapat Jensen dan Meckling (1976) terdapat beberapa bentuk biaya keagenan yaitu:

1. Biaya pemantauan (*the monitoring expenditure by the principal*).

Biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik. Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer.

2. Biaya penjaminan (*the bonding cost*)

Biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan yang harus dikeluarkan prinsipal kepada agen. Biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

3. Kerugian residu (*the residual loss*)

Biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan (*monitoring*) dan penjaminan (*bonding*) telah dilaksanakan.

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto,2018:6). Perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer adalah perspektif informasi dan oportunistik. Perspektif informasi adalah pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan di masa depan.

Sedangkan perspektif oportunistik adalah pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain (Sulistyanto,2018:10).

Younis, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan penggunaan penilaian manajerial untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan pemangku kepentingan eksternal dan juga seluruh pemegang saham. Pengertian manajemen laba secara sederhana adalah tindakan yang dilakukan manajer untuk memanipulasi laba diperoleh selama periode berjalan. Terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba adalah sebagai berikut (Sulistiawan,dkk.,2011:31):

1) Motivasi Bonus

Dalam sebuah kontrak bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah bonus sebagai *feedback* atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja manajemen salah satunya diukur dari pencapaian tingkat laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut dapat memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

2) Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, manajer juga terkadang melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Supaya perusahaan memperoleh pinjaman dalam jumlah besar dan kreditor bersedia menginvestasikan dananya, tentu manajer harus menunjukkan performa yang baik dari laporan keuangannya yang sering kali memunculkan tindakan kreatif dari manajer untuk menunjukkan pelaporan laba yang maksimal. Selain untuk mendapatkan pinjaman, kasus seperti itu juga berlaku untuk menjaga perjanjian utang.

3) Motivasi Pajak

Beberapa perusahaan cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. Perilaku seperti ini bukanlah perilaku unik yang didominasi oleh korporasi, melainkan perilaku yang umum terjadi, di mana manusia yang bersifat oportunis cenderung ingin mendapatkan basil sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan sumber daya serendah-rendahnya.

2.1.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) mulai dibicarakan di kawasan Asia sekitar akhir 1990-an, sementara di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang memuncak pada saat krisis ekonomi. Istilah

Good Corporate Governance (GCG) seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya (Hamdani,2018:20). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 1 ayat 1, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didorong dari sisi etika dan peraturan. Dorongan dari etika datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholder* dan menghindari cara-cara yang menciptakan keuntungan sesaat. Dorongan dari peraturan “memaksa” perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indrarini,2019:49). Tujuan yang diharapkan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dapat mengurangi masalah-

masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan, sehingga akan menciptakan rasa aman kepada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi. Manajemen sebagai pengendali perusahaan akan bertindak sesuai dengan aturan dan tidak lagi bertindak semaunya akibat adanya keterbatasan informasi yang dimiliki investor. Selain itu, kesadaran mengenai praktik *Good Corporate Governance* (GCG) akan mendorong transparansi perusahaan.

Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan deviden.

Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 3 tentang

penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:

- 1) *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.
- 2) *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
- 3) *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4) *Kemandirian (Independence)*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) *Kewajaran (Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di

perusahaan (Kustina, 2019). Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar (Rusdiyanto,dkk.,2019: 81). Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang meningkat. Melalui peningkatan kepemilikan manajerial dapat menurunkan biaya agensi. Hal ini dikarenakan keberadaan kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan, dipandang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Namun tingginya tingkat kepemilikan manajerial juga dapat menimbulkan masalah pertahanan yang artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya (Rusdiyanto,2019:80). Kepemilikan institusional merupakan bagian lain dari mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholder*.

Cornett, *et al.*, 2008 menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Tindakan *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional dapat membatasi perilaku manajer sehingga keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer untuk memperhatikan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer

2.1.6 Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi (Rusdiyanto,dkk.,2019:79). Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar terciptanya perusahaan yang *Good Corporate Governance* (GCG). Istilah independen pada komisaris independen memiliki pengertian yang menunjukkan bahwa mereka adalah wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor (Effendi,2017:42). Selain itu independen pada komisaris independen juga berarti pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasehat kepada direksi. Perbedaannya adalah bahwa komisaris independen menurut penjelasan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 120 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan anggota dewan komisaris lainnya. Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) telah dipatuhi serta diterapkan dengan baik, seperti menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan

secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perusahaan (Effendi,2017:36). Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem tetapi tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris.

2.1.7 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) karena merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan (Effendi,2017:63).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan

tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Hamdani,2018:92). Komite audit merupakan komponen dalam sistem pengendalian perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap manajemen laba. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Khuriyati (2018), meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan direksi, dan *leverage* serta manajemen laba sebagai variabel terikat. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
2. Bellavito (2018), meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang *Listing* di BEI”. Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan manajerial,

dewan komisaris independen, reputasi auditor, kompensasi bonus, sedangkan variabel terikatnya adalah manajemen laba. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh positif terhadap manajemen laba dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Rahmat (2018), melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba dan Efeknya Terhadap Kinerja Keuangan”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, serta variabel terikatnya adalah manajemen laba. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sementara kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
4. Kustina (2019), meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba”. Variabel bebas penelitiannya adalah kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, dan kompensasi bonus, sedangkan variabel terikatnya adalah manajemen laba. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan

metode *purposive sampling*. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

5. Fatimah (2019), meneliti tentang “Pengaruh *Leverage* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba”. Variabel bebas penelitian yang digunakan adalah kepemilikan manajerial dan *leverage*, sedangkan variabel terikatnya adalah manajemen laba. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
6. Kirana (2019), meneliti tentang “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”. Variabel bebas penelitian tersebut adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, sementara variabel terikatnya adalah manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan variabel

kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

7. Dewi (2019), melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan, sementara manajemen laba sebagai variabel terikat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
8. Perdana (2019), meneliti tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia”. Variabel bebas penelitian yang digunakan adalah kepemilikan institusional, *leverage*, dan komite audit, sedangkan manajemen laba sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.

9. Putri (2019), meneliti tentang “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (2014-2018)”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial, dan *leverage* serta manajemen laba sebagai variabel terikat. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
10. Lindra (2020), meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, sedangkan manajemen laba sebagai variabel terikat. Menggunakan teknik *purposive sampling* dengan analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.